

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Oktavia Suryaningsih, dkk (2018) dengan judul Peran lembaga Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Wanurejo dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu lembaga desa yang berperan dalam pengembangan desa wisata wanurejo yaitu pemerintahan desa dengan salah satu perannya melakukan pengaturan sumber daya dengan membentuk badan pariwisata desa (Bapardes) yang memiliki peran salah satunya mengadakan pelatihan kepada para pelaku wisata. Pengembangan desa wisata wanurejo berdampak terhadap kondisi perekonomian masyarakat lokal, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat lokal, diversifikasi pekerjaan, dikembangkan banyak usaha baru terkait wisata, peningkatan harga produk kerajinan masyarakat, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa wisata wanurejo dan lain-lain.
2. Penelitian yang ditulis oleh Susi Iswanti (2022) dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskripsif. Temuan dari penelitian ini yaitu peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Pulau Tilan

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berjalan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan, akan tetapi masih terdapat sedikit kekurangannya, sehingga masih dikatakan belum maksimal. Adapun faktor penghambatnya yaitu sebagai berikut, kurangnya modal dalam pengembangan objek wisata, rendahnya sumber daya manusia, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani (2019) meneliti tentang peran badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran BUMDes gentha persada dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikelola di bawah BUMDes dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat (Pradnyani, 2019)
4. Penelitian yang berjudul Peran BUMDES dalam mengelola Desa Wisata Bukit Kehi sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Kertagena Daya, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes melalui unit Usaha Desa Wisata Bukit Kehi adalah sebagai pengembangan ekonomi masyarakat yaitu mengelola dan mengembangkan desa wisata Bukit Kehi, termasuk pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes yaitu

merencanakan program desa wisata bukit kehi, mengelola sarana dan prasarana, mempromosikan desa wisata melalui media sosial Instagram dan whatsapp untuk meningkatkan pengunjung dan melakukan kegiatan monitoring atau evaluasi. Peran BUMDes selanjutnya adalah melaksanakan program pelatihan pembuatan legen, gula merah dan kantong siwalan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dengan adanya peran BUMDes melalui unit usaha desa wisata Bukit Keki membuka lapangan kerja baru, membuka lapangan, membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa Kertagena Daya.

5. Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek/ Ema Riana Dewi (2018). Hasil penelitian menyatakan bahwa program dalam pengembangan desa wisata di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ada enam yaitu :
  - (1) Program paket wisata, program kebersihan lingkungan, program pengolahan pupuk organik dari sampah dapur, program sayur organik, program edukasi stek durian, dan program festival durian.
  - (2) Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Sawahan meliputi sosialisasi, pendukung, mengontrol, promosi dan mengevaluasi.
  - (3) Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Sawahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, promosi serta ramah-tamah dan gotong royong,
  - (4) Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata di Desa Sawahan meliputi hasil

potensi desa, partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, sinergi pemerintah desa dan masyarakat, dan modal social masyarakat. (5) Faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata di Desa Sawahan meliputi partisipasi masyarakat, pendanaan, dan wisata kebun durian yang bersifat musiman. (6) Cara mengatasi hambatan dalam pengembangan desa wisata di Desa Sawahan yaitu pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengembangan desa wisata mengajukan proposal ke BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Trenggalek, dan pemanfaatan potensu desa lainnya yang ada dan yang musim agar tidak tergantung dengan musim durian dan pengembangan desa wisata di Desa Sawahan tetap berjalan.

## **B. Konsep Peran**

Menurut Soekanto (2003) peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Seseorang menjalankan peranan ketika ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Setiap individu memiliki berbagai peranan yang berasal dari pola-pola interaksi sosial dalam kehidupan mereka. Peranan juga diberikan apabila seseorang mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, jika tidak berdasarkan kemampuannya maka peranan tersebut tidak akan berjalan secara optimal dan maksimal. Sedangkan menurut Soeloeman Soemardi mengembangkan konsep peran sebagai pola perilaku yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat terhadap individu dalam berbagai bentuk

situasi. Peran ini mencakup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu sesuai dengan dalam struktur sosial.

Dikutip dari Riyadi (2002), peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep mengenai posisi yang dijalankan oleh suatu pihak dalam struktur sosial. Dengan peran tersebut, baik individu maupun kelompok akan menjalankan proses sesuai dengan tuntutan harapan yang ditetapkan secara struktural, seperti norma-norma dan tanggung jawab. Dalam serangkaian tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan sesuai dengan fungsi pengorganisasian. Hal ini sekaligus mengartikan apabila suatu peranan dapat menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dalam menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut Nopiansyah, & Setiawan (2019) peran dibagi menjadi tiga aspek, antara lain adalah :

- 1) Peranan mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah konsep tentang apa yang bisa dilakukan seseorang dalam lingkungan masyarakat dan organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang memiliki peran penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat.

Dari pandangan Prof. Dr. Koentjaraningrat memandang peran sebagai bagian dari sistem sosial budaya yang mengatur interaksi dan hubungan

antar individu dalam masyarakat. Peran ini dipelajari dan dipertahankan melalui proses sosialisasi dan adat istiadat.

Hakekatnya adalah peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau tanggung jawab yang diembannya. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi cara peran tersebut harus dijalankan. Selain itu, peran tersebut juga dapat dilakukan atau dijalankan oleh pimpinan di semua tingkatan, baik tingkat atas, menengah, maupun bawah, karena dari beberapa pengkelompokan tersebut semuanya memiliki peran yang serupa. Sedangkan menurut Sutarto (2009), peran terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yang merujuk pada pemahaman seseorang atas apa yang harus dilakukan dalam situasi khusus.
- 2) Harapan peran, yaitu: ekspektasi orang lain terhadap individu yang menempati posisi tertentu terhadap bagaimana seharusnya mereka bekerja.
- 3) Pelaksana peran, yaitu yang mencakup perlakuan nyata dari seseorang yang berada dalam posisi khusus. Bila tiga komponen ini terlaksanakan secara harmonis, sehingga interaksi sosial berlangsung dengan lancar dan berkelanjutan.

Mengacu pada uraian diatas peran sendiri dapat dilakukan atau dikerjakan oleh suatu individu maupun kelompok sesuai dengan batas dan aturan masing-masing, karena disetiap posisi atau jabatan dari pelaksana peran sendiri memiliki tugas dan fungsi masing- masing.

Apabila dalam suatu kelompok maupun individu menjalankan peran yang berbeda maka akan terjadi tidak kesinambungan dan kelancaran dalam sebuah interaksi sosial. Selain itu juga perlu adanya sebuah pengawasan atau koordinasi dari salah satu pihak ketika dalam sebuah pengambilan keputusan terdapat beberapa perbedaan pengambilan keputusan.

Dengan adanya penjelasan mengenai komponen diatas dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu tindakan yang mengatur individu atau organisasi dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama, agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan optimal. Merujuk pada Soekanto (2003), peran dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

- a) Peran Aktif merujuk pada peran yang dijalankan oleh anggota kelompok atau individu karena kedudukannya didalam kelompok tersebut sebagai aktifitas kelompok seperti, pengurus, pejabat dan lain sebagainya
- b) Peran Partisipatif yaitu peran yang diambil dari anggota kelompok, di mana kontribusinya mengasih manfaat bagi kelompok itu sendiri.
- c) Peran Pasif ialah kontribusi yang diberikan oleh anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota tersebut menahan diri dari tindakan aktif untuk memberi ruang bagi fungsi-fungsi lain dalam kelompok agar dapat berjalan dengan optimal.

Dari berbagai pendapat menurut para ahli mengenai makna sebuah peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebutkan bahwa peran merupakan

sebuah hal yang normatif. Pada dasarnya, peran didefinisikan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang muncul akibat sebuah peran khusus. Sifat seseorang juga mempengaruhi cara peran tersebut terlaksanakan. Dengan peran itu, dari individu ataupun kelompok menjalankan proses sejalan dengan tuntutan aspirasi yang ditetapkan dalam hal struktural, termasuk norma dan tanggung jawab. Dalam serangkaian tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan sesuai dengan fungsi pengorganisasian

### **C. Konsep BUMDes**

BUMDes sendiri merupakan suatu lembaga daerah yang menjalankan pelaksanaan urusan pemerintahan dan keperluan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya peran BUMDes dalam hal pembangunan baik itu fisik maupun non fisik, maka diperlukan tindakan nyata yang dilakukan oleh BUMDES dalam berbagai aspek demi menunjang keberhasilan potensi desa menjadi lebih baik dan berkembang.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa memegang peranan penting, yang menunjukkan di mana pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan termasuk elemen utama dalam sistem pembangunan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yaitu Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Desa dan kesejahteraan masyarakat desa melalui beberapa sarana prasarana desa.

Sedangkan dari Ahmad Yani (2002), beberapa urusan yang diberikan kepada daerah yaitu pengelolaan yang dapat menghasilkan pendapatan untuk pemerintah daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan sebagai sumber pendapatan baru. Pendapatan asli daerah (PAD) ini diharapkan dapat menutupi biaya rutin daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah meliputi hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, daerah otonom di Indonesia sebenarnya memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengatur serta mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ke wilayah yang diberikan otonomi khusus seperti Pemerintah Desa akhirnya turun sebuah regulasi turunan mengacu kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengelola segala urusan pemerintahannya berdasarkan prakarsa masyarakat. Menurut Kurniawan (2018:32) dengan adanya otonomi khusus yang diberikan ke Pemerintah Desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

- a). Berada diluar struktur organisasi pusat.
- b). Keputusan yang berlandaskan aspirasi masyarakat.
- c). Tidak dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat.

- d). Tidak mengalami campur tangan pemerintahan pusat.
- e). Memiliki integritas sistem, batas batas tertentu (boundaries), serta identitas yang jelas.

Menurut sejarahnya, pemerintahan desa dibentuk masyarakat desa dengan menentukan sejumlah anggota yang dipercaya mampu mengatur, menata, melayani, dan melindungi aspek kehidupan masyarakat desa (Awang, 2010,60). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Desa adalah merupakan sebuah lembaga kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yurisdiksi, berwenang mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten dan Kota.

Bedasarkan penjelasan diatas, maka bisa dikatakan bahwa desa ialah sekumpulan masyarakat hukum yang merupakan unit organisasi paling kecil dibawah Kecamatan yang memiliki wewenang untuk menyusun urusan rumah tangga dan mengelola keperluan masyarakat setempat sesuai dengan hukum dan adat istiadat lokal.

Desa adalah organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi dan kemandirian. Menurut Supriatna (2002), aspek-aspek yang harus diperankan oleh BUMDES dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah:

- a. Memberikan bantuan masyarakat berupa program-program pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

- b. Memberi dukungan kepada masyarakat dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, seperti penyediaan sarana ekonomi, untuk mendukung kelompok yang kurang beruntung agar dapat hidup dengan layak.
- c. Membantu meningkatkan pemasukan masyarakat dengan dorongan akses dan pemodalan

#### **D. Konsep Pengembangan Desa Wisata**

Pengembangan desa wisata harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan infrastruktur pariwisata yang mendukung.

Sedangkan menurut (Ardika) Pengembangan desa wisata harus berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan desa-desa yang dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Dikutip dari Paturusi (2001), pengembangan merupakan strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan daya tarik wisata agar bisa menarik pengunjung sehingga memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar dan juga Pemerintah. Sementara itu, menurut J.S Badudu, (1994) dalam kamus Bahasa Indonesia, pengembangan merujuk pada proses, metode atau hasil dari kegiatan mengembangkan.

Berikutnya, menurut George (2019), sebuah destinasi dapat dianggap sedang mengembangkan pariwisata jika sudah terdapat aktivitas wisata.

Untuk meningkatkan potensi parawisata penting melakukan perencanaan pengembangan agar hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Ada tiga prinsip utama untuk pengembangan parawisata yaitu:

1. Keberlanjutan ekologis, yaitu memberi jaminan pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi biologis dan mempertimbangkan keberagaman sumber daya ekologis yang tersedia.
2. Keberlanjutan sosial dan budaya, yaitu memastikan pengembangan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat setempat dan sejalan dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut.
3. Keberlanjutan ekonomi, yaitu memastikan pengembangan dilakukan secara ekonomis dan sumber daya yang digunakan dapat bertahan untuk memenuhi kebutuhan dimasa mendatang.

Desa wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi yang berlaku. (Nuryanti, Wiendu 1993).

Ada dua konsep utama yang menjadi komponen dalam desa wisata sebagai berikut:

- a. Akomodasi: Melibatkan beberapa konsep tempat tinggal penduduk setempat atau unit-unit yang berkembang berdasarkan konsep tempat tinggal masyarakat lokal.

b. Atraksi: Mencakup seluruh kehidupan sehari-hari penduduk setempat serta pengaturan fisik lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi secara aktif, seperti dalam kegiatan tari, Bahasa, dan kegiatan tertentu lainnya.

## **E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Asriyah (2007), kesejahteraan masyarakat menyangkut kesejahteraan setiap orang secara menyeluruh pada semua anggota Masyarakat. Di dalam hal ini kesejahteraan yang di maksud adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama. Kesejahteraan adalah keadaan di mana kebutuhan fisik dan mental seseorang dapat dipenuhi secara optimal, sesuai dengan standar hidup yang layak. Kesejahteraan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya :

#### **A. Pendudukan**

Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Kependudukan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu anggota rumah tangga, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, serta angka beban ketergantungan.

#### **B. Pendidikan**

Pendidikan adalah hak asasi manusia dan hak dari setiap penduduk untuk dapat membangun potensinya melalui siklus pembelajaran. Setiap

penduduk Indonesia memiliki pilihan untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki tanpa melihat posisi masyarakat (status sosial), status keuangan, identitas, agama dan area geografis. Pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu Pendidikan yang ditamatkan angka melek huruf, angka putus sekolah, dan angka partisipasi sekolah. Semakin rendah angka sekolah maka akan semakin sejahtera keadaan suatu daerah.

#### C. Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dan sebagai indikator pencapaian kemajuan pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit mempertahankan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Sehingga pembangunan dan Upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat mencapai semua tingkat masyarakat dan tidak membedakan dalam penerapannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan dapat dilihat dari angka harapan hidup, bisa atau tidaknya masyarakat melaksanakan kesehatan dan mampu atay tidaknya untuk mendanai sepenuhnya pengobatan yang diperlukan.

#### D. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan merupakan indikator yang bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang disebut pendapatan yaitu semua penghasilan yang diperoleh seseorang atau keluarga dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan terdiri dari gaji pekerjaan, gaji dari property, seperti, sewa, bunga dan keuntungan, dan pinjaman dari otoritas publik.

#### E. Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga

Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk keperluan rumah tangga yang betul-betul dikonsumsi atau dibayarkan tanpa memperhatikan asal barang baik pembelian maupun pemberian. Pengeluaran masyarakat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengeluaran pangan dan non pangan. Keseimbangan antara pengeluaran pangan dan non pangan juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

#### F. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan yaitu jumlah seluruh penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

#### G. Perumahan dan lingkungan hidup

Perumahan dan lingkungan hidup adalah tempat berlindung yang mempunyai lantai, atap, dan dinding baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Perumahan selain sebagai kebutuhan manusia juga memiliki peranan penting dalam tugasnya sebagai pusat untuk pemeriksaan keluarga dan meningkatkan kualitas orang di masa depan datang. Demikian juga,

rumah merupakan penentu kesejahteraan masyarakat, di mana rumah yang nyaman dan sehat adalah rumah yang mampu mendukung keadaan kesehatan setiap penduduknya.

## **F. Indikator Kesejahteraan**

Menurut Badan Pusat Statistik (2005), ada delapan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, yaitu:

### **A. Konsumsi dan pengeluaran**

Indikator pengeluaran dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

#### **1. Tinggi**

Dikatakan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung per bulan sebesar  $> \text{Rp. } 5.000.000$ .

#### **2. Sedang**

Dikatakan sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp.  $1.000.000 - \text{Rp. } 5.000.000$ .

#### **3. Rendah**

Dikatakan rendah apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar  $< \text{Rp. } 1.000.000$ .

### **B. Keadaan tempat tinggal**

Indikator tempat tinggal mencakup lima aspek, yaitu jenis atap, dinding, status kepemilikan, jenis lantai dan luas lantai rumah. Kelima aspek ini kemudian dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

#### **1. Permanen**

Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

## 2. Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semu/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

## 3. Non Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana yang lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

## C. Fasilitas tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal mencakup dua belas aspek, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Kedua belas aspek ini kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

### 1. Lengkap

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai dua belas item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.

### 2. Cukup

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari enam item namun tidak sampai dua belas item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

### 3. Kurang

Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari enam item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

## D. Kesehatan

Indikator kesehatan anggota keluarga dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

### 1. Bagus

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga setidaknya < 25% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

### 2. Cukup

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai persentase kesehatan berada pada kisaran 25% - 50% dibandingkan dengan kondisi sakit.

### 3. Kurang

Indikator ini menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai persentase kesehatan di bawah rata-rata atau > 50% kehidupan mereka yang berada dalam kondisi sakit.

## E. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

### 1. Mudah

Golongan ini berarti apabila lima item dari penjelasan di atas sudah terpenuhi semua.

2. Cukup

Golongan ini berarti apabila lima item dari penjelasan di atas ada yang tidak terpenuhi, namun tidak lebih dari dua item atau setidaknya tiga item dari indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

3. Sulit

Golongan ini berarti apabila lima item dari penjelasan di atas lebih banyak yang tidak terpenuhi atau lebih dari tiga item indikator tidak terpenuhi.

F. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang Pendidikan

Indikator kemudahan akses pendidikan anak mencakup tiga aspek, yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Ketiga aspek ini kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Mudah

Golongan ini berarti tiga indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.

2. Cukup

Golongan ini berarti dari tiga indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.

3. Sulit

Golongan ini berarti tiga indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya satu indikator yang dapat dipenuhi.

G. Kemudahan mendapatkan transportasi

1. Mudah

Golongan ini berarti tiga indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan sudah terpenuhi.

2. Cukup

Golongan ini berarti dari tiga indikator kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan salah satunya ada yang tidak terpenuhi.

3. Sulit

Golongan ini berarti tiga indikator dari kemudahan memasukkan anak ke dalam pendidikan hanya satu indikator yang dapat dipenuhi.

